ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management
Volume 8, Nomor 2, Maret – April 2025
e-ISSN : 2598-5159
p-ISSN : 2598-0742
DOI: https://doi.org/10.31539/alignment.v8i2.14761

PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Norika Aud[1], Abner H. Bajari[2], Ari Juliyana[3]
Universitas Terbuka[1,3]
Universitas Cenderawasih[2]
norikaaud534@gmail.com[1]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran dan faktor yang mendukung dan menghambat operan dinas tenaga kerja dalam pembangunan manusia di Kabupaten Mamberamo Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisa Penyajian Data (Data Display), Kondensasi Data (Data Condensation), Penarikan Kesimpulan (Drawing and Verification Conclusions). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah, yang meliputi : Stabilisator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana telah berjalan dengan baik dalam rangka menunjang pembangunan manusia terkait dengan bidang ketenagakerjaan. Faktor pendukung Peran Dinas Tenaga Kerja adalah adanya aturan hukum yang jelas, ketepatan fungsi dan keterbukaan informasi serta tersedianya anggaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor internal berupa kurangnya inisiatif Disnaker Kabupaten Mamberamo Tengah dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga faktor eksternal yang melipti tingkat Pendidikan pencari kerja yang masih rendah, kurang keahlian dan ketrampilan serta masih terbatasnya kesempatan kerja.

Kata Kunci : Dinas Tenaga Kerja, Pembangunan Manusia

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role and factors that support and inhibit the operation of the labor office in human development in Central Mamberamo Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative with data collection using interviews, observations and documentation. While the analysis techniques are Data Display, Data Condensation, Drawing and Verification Conclusions. The results of the study indicate that: The Role of the Manpower Office in Human Development in Central Mamberamo Regency, which includes: Stabilizer, Innovator, Modernizer, Pioneer and Implementer has been running well in order to support human development related to the field of employment. Supporting factors for the Role of the Manpower Office are the existence of clear legal regulations, accurate functions and openness of information and the availability of a budget. While the inhibiting factors are internal factors in the form of a lack of initiative from the Central Mamberamo Regency Manpower Office in utilizing existing facilities and also external factors that include the low level of education of job seekers, lack of expertise and skills and limited job opportunities.

Keywords: *Department of Manpower, Human Development*

PENDAHULUAN

Pemerintahan dibentuk untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar. Tanpa kehadiran pemerintah, yang akan terjadi adalah penindasan yang kuat terhadap yang lemah, sehingga akan menciptakan suatu keadaan yang digambarkan oleh Hobbes sebagai keadaan dimana "manusia yang satu menjadi srigala terhadap manusia yang lain". Dengan demikian, pemerintah dibentuk bukan untuk melayani dirinya sendiri ataupun dilayani oleh masyarakat, melainkan untuk melayani

kebutuhan masyarakat. Negara menjadi institusi yang kuat dalam pemberian pelayanan kebutuhan dan kepentingan umum yang luas dan kompleks. Ini sebagimana jelas dalam proposisi negara sebagai institusi yang hadir melalui kontrak sosial. Mereka diberi kekuasaan berdasarkan konsensus sosial dan politik untuk bertindak atas nama publik atau masyarakat. Dalam hal ini Negara dianggap sebagai organ yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan berbagai fungsi dalam kehidupan publik. Sementara menurut Grindle (2010).dalam prakteknya pembangunan terus memanggil negara untuk tumbuh dan untuk mengasumsikan peran yang semakin meningkat dalam pembangunan ekonomi dan sosial di satu sisi, akan tetapi bukti empiris menunjukkan tentang kapasitas destruktif negara sebagai mesin pertumbuhan dan penyedia pembangunan sosial di sisi lainnya.

Secara teoritis, Abner Bajari (2019) memaparkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan data dasar (database) dalam penentuan kelompok sasaran (targeting); (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan. Bajari dkk (2020) selanjutnya menyebutkan, sebagaimana misalnya Grindle (2010) menyebutkan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi merupakan tujuan terpadu pemikiran awal tentang bagaimana negara bisa menjadi lebih makmur. Kenyataannya, sebagaimana Anthony Hall dan James Midgley (2004) katakan bahwa konseptualisasi teoritis kebijakan sosial dalam konteks pembangunan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun istilah “pembangunan” mengandung konotasi yang berbeda ditafsirkan di berbagai negara dan wilayah di dunia, paling sering terjadi digunakan untuk mengkonotasikan suatu proses pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi di banyak belahan dunia belum pernah terjadi disertai dengan tingkat kemajuan sosial yang bersamaan. Pertumbuhan Ekonomi yang gagal menaikkan standar hidup untuk semua orang, hampir tidak dapat terjadi sebagaimana digambarkan dalam konsep dan teori pembangunan (developmentalisme).Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Bajari, dkk (2020) lebih lanjut bahwa perhatian tentang kebijakan sosial seharusnya menjadi perhatian serius saat ini. Secara khusus, kebijakan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat yang mengalami beberapa bentuk kerugian (Alison McClelland and Paul Smyth, 2014).

Kebijakan sosial akan membantu lebih banyak perbaikan masyarakat dalam aspek yang beragam seperti Kualitas hidup, Pendidikan, Kewarganegaraan, Budaya, Penghasilan, Ekonomi, dan Residen di daerah pedesaan (Hernandez,et.al, 2011). Karenanya, banyak aktivitas kebijakan bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang buruk, tapi sekali lagi, apa yang dianggap Kebijakan yang buruk akan berbeda menurut nilai dan kepercayaan masyarakat, dan mengubah gagasan tentang apa yang berhasil. Secara konseptual, sebagaimana menurut Riyadi dalam Yahya Usman, dkk (2023), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, maka pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Menurut Gustian Ainun Majib (2023) peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Peran yang dimana salah satunya menurut Bambang Ismanto, (2022) peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang karena status sosialnya, baik

yang bersifat formal maupun informal. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran mengacu pada tugas-tugas yang harus dilakukan seseorang karena posisinya dalam posisi tertentu di lingkungan dimana ia berada.

Kebijaksanaan dalam mengatasi pengangguran ialah memperluas kesempatan bekerja dan hal ini menjadi tugas penguasa. Jika penempatan dalam lapangan pekerjaan ini dilakukan dengan memperhatikan kecakapan mereka yang bersangkutan maka tertolonglah, tidak hanya sebagian besar para pengangguran biasa dan pengangguran musiman tetapi juga apa yang biasanya disebut setengah penganggur (Oemar Hamalik, 2000). Pengangguran menurut Sadono Sukirno (2014), yaitu suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Sagir (1989) mengemukakan bahwa ada beberapa kebijaksanaan perlu ditempuh dalam menangani masalah ketenagakerjaan yaitu dengan adanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan mutu kerja, penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, pengendalian pertumbuhan angkatan kerja dan pembinaan industrial, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek yang perlu dibangun dan disejahterakan, sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan. Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah kesejahteraan para pekerja. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah dalam pembangunan manusia dapat menghadapi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, seperti pengangguran, rendahnya keterampilan, dan kesenjangan upah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Penelitian ini melibatkan 6 (enam) orang informan yang meliputi : kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabag Umum, Kasi Ketenagakerjaan serta staf Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Membramo Tengah. Dengan menggunakan pendekatan Huberman dan Saldana (2014), komponen-komponen dalam analisis data yaitu: Penyajian Data (Data Display), Kondensasi Data (Data Condensation), Penarikan Kesimpulan (Drawing and Verification Conclusions) menjadi suatu gambaran keberhasilan yang berurutan sebagai suatu rangkaian kegiatan analisis yang saling mengikuti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Membramo Tengah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Membramo Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Membramo Tengah. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah yang didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023), pemerintah memegang peranan dominan dalam proses pembangunan. Peran yang ditonjolkan adalah sebagai stabilisator, inovator, modernisasi, pionir dan pelaksana kegiatan pembangunan tertentu.

Stabilisator

Menurut Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023), sebagai stabilisator peran tersebut terlihat ketika pemerintah dapat melakukan perubahan tanpa menimbulkan keresahan sosial, atau hal-hal lain yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara sehingga dapat terwujud. diterima oleh masyarakat. Poerwodarminta menjelaskan peran adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

berdasarkan suatu peristiwa. Peran stabilisator dalam hal ini adalah peran pemerintah dalam mewujudkan perubahan tanpa menimbulkan guncangan sosial, terutama yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan persatuan serta kesatuan bangsa. Peran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui kemampuan selektif yang tinggi, pendidikan dan sosialisasi, pendekatan bertahap, pendekatan persuasif. Partisipasi pemerintah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempunyai fungsi stabilisator. Sebagai stabilisator, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan stabilisator yang menjaga stabilitas khususnya Kabupaten Mamberamo Tengah agar tetap stabil dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana program serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari bentuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program-program kerja yang ada di Dinas, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia dalam hal ini terkait dengan ketenagakerjaan dan penanggulangan pengangguran dengan memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan dari beberapa perusahaan yang dapat dilamar oleh para pencari kerja.

Inovator

Inovasi merupakan suatu hal atau gagasan baru yang sengaja diciptakan untuk memudahkan suatu tindakan atau pelayanan dalam mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023) menjelaskan bahwa untuk menjalankan tugasnya sebagai inovator, pemerintah harus mampu menjadi sumber ide-ide baru, sehingga pemerintah dapat menjadi sumber ide-ide baru dan inovasi yang dapat mempermudah pelaksanaan tugasnya. Suherli Kusmana (2010) dalam Dudun Supriadi (2017) menyatakan bahwa inovasi adalah suatu bentuk konsekuensi atau risiko yang timbul akibat terciptanya sesuatu yang baru dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan suatu prosedur, peristiwa atau gagasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan Nasution dan Kartajaya (2015) menyatakan inovasi adalah kelangsungan kegiatan penemuan dan inovasi termasuk kegiatan penciptaan nilai yang melibatkan teknologi. Siagian menjelaskan, agar pemerintah dapat memenuhi posisinya sebagai inovator dengan baik, maka pemerintah harus menjadi sumber atau titik tolak tumbuhnya ide-ide cemerlang atau ide-ide efektif yang fokus pada penerapan inovasi dalam lingkungan birokrasi. Pertama, pemerintah bisa menjadi inovator baik dari segi prosedur maupun sistem. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah harus mampu menjadikan dirinya sebagai sumber ide atau konsep baru. Sebagai aparatur pemerintah mempunyai dua fungsi paralel, yaitu tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan dalam program ketenagaan kerja saja, namun juga sebagai penemu dan penerjemah gagasan setiap permasalahan, termasuk dalam program pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga sekaligus menjadi perumus kebijakan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai inovator, telah melakukan terobosan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu ditambah bantuan produktivitas kewirausahaan dan bantuan peralatan, bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan dunia industri, serta OPD terkait lainnya. dipergunakan secara maksimal.

Modernisator

Menurut Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023), dalam modernisasi melalui pembangunan, setiap negara pasti ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, sehingga untuk mewujudkan pembangunan modernisasi di setiap negara diperlukan antara lain: pengetahuan yang cukup, kemampuan manajerial dan kehandalan, kemampuan mengolah sumber daya alam yang mempunyai nilai tambah tinggi, mempunyai sistem pendidikan yang handal

sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai pemikiran produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, mempunyai arah masa depan yang jelas sesuai keinginan sehingga dapat terwujud di masa depan. Sebagai Modernizer, pemerintah berperan menggiring masyarakat yang sedang berkembang ke arah modernisasi dan meninggalkan cara-cara serta pola hidup tradisional yang sudah tidak sesuai dengan cara hidup saat ini. Oleh karena itu, untuk melakukan proses modernisasi tersebut dapat dimulai dari birokrasi pemerintahan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk membantu para pencari kerja agar cepat mendapatkan pekerjaan. Dalam strategi ini, Dinas Tenaga Kerja mengembangkan keterampilan para pencari kerja sehingga para pencari kerja memiliki kualitas yang terjamin.

Pelopor

Menurut Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023), sebagai pelopor, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan, namun juga sebagai pelaksana pembangunan inovatif yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada. Sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Dalam menyelesaikan masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pelopor perintis hubungan kerja sama dengan industry yang ada serta bertindak berdasarkan pedoman, aturan, dan kode etik yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan memberikan kemudahan dalam penanganan permasalahan pengangguran dan informasi pekerjaan kepada para pencari kerja. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dengan Peran sebagai pelopor Dinas Tenaga Kerja dalam pembangunan manusia di Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan upaya dengan memaksimalkan kinerja Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan dalam penanganan permasalahan pengangguran.

Pelaksana

Menurut Siagian dalam Yahya Usman, dkk (2023), sebagai pelaksana pemerintah harus mampu memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan nasional. Mengendalikan faktor-faktor negatif yang dapat menjadi penghambat pembangunan nasional agar dampaknya dapat diminimalkan, dan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong laju pembangunan nasional sehingga dapat mendatangkan manfaat yang besar. Selaku pelaksana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia yaitu dengan menjalankan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan baik karena tidak melibatkan pihak swasta, hanya melibatkan instansi terkait bila diperlukan, hal ini selaras dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peran sebagai pelaksana Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah

Faktor Pendukung

Arti kata pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyokong, menunjang, membantu dan sebagainya. Jadi, faktor pendukung adalah segala sesuatu yang bersifat mendorong atau memudahkan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, faktor

pendukung berikut ini merupakan hal-hal yang mendorong Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Faktor pendukung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah dalam perannya pembangunan manusia di Kabupaten Mamberamo Tengah antara lain:

1) *Pertama*, adanya aturan hukum yang jelas. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah mempunyai landasan hukum atau peraturan yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perluasan kesempatan kerja nasional, dengan demikian aturan yang digunakan sebagai landasan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah sangat jelas.
2) *Kedua*, ketepatan fungsi dan keterbukaan informasi. Dengan teknologi seperti media elektronik, masyarakat akan mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai instansi pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui papan informasi di gedung perkantoran dan informasi di website resmi.
3) *Ketiga*, tersedianya anggaran. Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan cukup besar, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai pelaksana dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan tersebut, sehingga dengan berbagai cara dan stategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah untuk mencari terobosan untuk mencarikan peluang kerja kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan kerja sama dengan industri-industri yang ada dan mengadakan Job Fair di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor pendukung Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah adanya aturan hukum yang jelas, ketepatan fungsi dan keterbukaan informasi serta tersedianya anggaran.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat kemajuan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini kendala-kendala yang dihadapi dalam Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah. Faktor penghambat yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah meliputi faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Faktor penghambat internal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah, adalah Dinas tenaga kerja kurang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, seperti bengkel kerja yang ada di dinas untuk melatih pencari kerja agar para pekerjaa memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang mesin. Selain itu pihak Dinas Tenaga Kerja juga kurang memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal positif berupa solusi bagi pencari kerja, misalnya menyedikan tenaga-tenaga kerja yang memiliki kualifikasi atau sertifikasi tertentu bagi pencari kerja dalam memenuhi permintaan pasar kerja di Kabupaten Mamberamo Tengah. Sedangkan faktor penghambat eksternal Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamberamo Tengah, adalah :

1) Pertama : Rendahnya tingkat Pendidikan para pencari kerja, sementara tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap lowongan pekerjaan, karena tidak sedikit pencari kerja yang peneliti temui mempunyai pendidikan yang rendah, hal ini menyebabkan pencari kerja sulit mendapatkan

pekerjaan, dan jika pencari kerja mendapat pekerjaan Besar kemungkinan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sementara.

2) Kedua : Kurangnya Keahlian dan Keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja, tingkat pendidikan yang menjamin keberhasilan dalam mendapatkan pekerjaan, namun keterampilan dan keahlian juga menjadi faktor penting dalam mendapatkan pekerjaan, karena rata-rata pencari kerja sudah mempunyai gelar sarjana namun belum diterima oleh perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan karena keahlian dan keterampilan pencari kerja tidak memenuhi kriteria perusahaan.
3) Ketiga, Terbatasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Mamberamo Tengah, terbatasnya kesempatan kerja menjadi faktor yang dapat menyebabkan angka pengangguran meningkat, karena meskipun pencari kerja mempunyai pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang berkualitas, namun jika kesempatan kerja terbatas maka hal tersebut akan sia-sia, pencari kerja tidak dapat terserap karena terbatasnya kesempatan kerja.

Hal ini sesuai hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor penghambat Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembangunan Manusia Di Kabupaten Mamberamo Tengah diantaranya adalah faktor internal berupa kurangnya inisiatif Disnaker dalam memanfaatkan fasilitas yang ada dan juga faktor eksternal yang meliputi tingkat pendidikan pencari kerja yang masih rendah, kurang keahlian dan keterampilan serta masih terbatasnya kesempatan kerja.

SIMPULAN

Bahwa peran Dinas Tenaga Kerja telah berjalan dengan baik, yang tercermin dari pelaksanaan peran sebagai stabilisator melalui sosialisasi program kerja, sebagai inovator dengan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu, sebagai modernisator dengan strategi pengembangan keterampilan pencari kerja, sebagai pelopor melalui kerja sama lintas sektor, serta sebagai pelaksana tugas dari Bupati sesuai regulasi yang berlaku. Faktor pendukung peran ini meliputi kejelasan aturan hukum, ketepatan fungsi, keterbukaan informasi, dan ketersediaan anggaran. Namun demikian, terdapat hambatan yang berasal dari faktor internal seperti kurangnya inisiatif dalam pemanfaatan fasilitas, serta faktor eksternal seperti rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keahlian dan keterampilan pencari kerja, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Bajari, Abner H, Ronsumbre Y (2020). *Pengantar Studi Administrasi, Pembangunan Dan Pemberdayaan: Tantangan dan Peluang.* Lontar Mediatama.

Bungin, Burhan (2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.* Gajah Mada Press

Dudun Supriadi, 2017. Implementasi Manajemen Inovasi dan Kreatifitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, *1(20).*

Gustian Ainun Majid, Gustian (2023). Peran Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah. *Thesis*, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.*

Hamalik, Oemar (2000). *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*. Bumi Aksara

Ismanto, Bambang., Tarbiyah, F., Keguruan, D. A. N., Negeri, U. I., & Lampung, R. I. (2022). Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Bakat Minat Dan Potensi Peserta Didik Di Smp Negeri 12 Bandar Lampung.

Kamelia, Rona (2021). Pengaruh Word Of Mouth Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Di Bandar Udara Tjilik Riwut

Palangka Raya. *Skripsi thesis, STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*

Manulang, Sendjun H. (1995), *Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan I*ndonesia. Rineka Cipta.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. UI-Press

O'Connor, Allan; Roos, Göran; Vickers-Willis, Tony. (2007). Evaluating an Australian public policy organization's innovation capacity. *European Journal of Innovation Management, 10 (4) 532 -558.*

Sagir, H.S. 1989. *Membangun Manusia Karya – Masalah Ketenagakerjaan dan. Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Sinar harapan

Sastrohadiwiryo, S.B. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan. Administratif dan Operasional*. Bumi Aksara

Smith, T. B. (1991). *The Comparative Analysis of Bureaucratic Accountability, Political Science.* The Asian Journal of Public Administration.

Sukirno, Sadono. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar Kebijakan (edisi ke kedua)*. Kencana Prenadamedia Group.

Yahya Usman, Nilawaty Yusuf dan Ayu Rakhma Wuryandini, 2023, Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Teori Peran. *Jurnal Mirai Management, 8 (2), 41 – 47*